

PELAKSANAAN PEWARISAN
BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT ACEH
(STUDI KASUS DI KEC. LABUHANHAJI KAB. ACEH SELATAN)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Pada Fakultas Hukum

Oleh:
ZIA UL KARNAIN
NIM : C. 100.100.117

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA
2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PEWARISANBERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT
ACEH(STUDI KASUS DI KEC. LABUHANHAJI KAB. ACEH SELATAN)**

NASKAH PUBLIKASI

Yang ditulis oleh:

ZIA UL KARNAIN
C. 100. 100. 117

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji oleh:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ri' or similar, with a long horizontal stroke extending to the right.

(Septarina Budiwati, S.H, M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT
ACEH (STUDI KASUS DI KEC. LABUHANHAJI KAB. ACEH SELATAN)**

Yang ditulis Oleh :

ZIA UL KARNAIN

C. 100.100.117

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal, 06 Maret 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Septarina Budiwati, S.H, M.H, (.....)

Anggota Penguji I : Inayah, S.H, M.H (.....)

Anggota Penguji II : Shalman Alfarizi, S.H, M.H, M.Kn (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 06 Maret 2017

Penulis



ZIA UL KARNAIN
C. 100.100.117

PELAKSANAAN PEWARISANBERDASARKAN HUKUM WARIS ADATACEH

(STUDI KASUS DI KEC. LABUHANHAJI KAB. ACEH SELATAN)

ABSTRAK

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju kearah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia. Hukum waris adat adalah untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau, hukum waris Jawa dan sebagainya. Jadi istilah hukum waris adat atau juga akan disebut hukum adat waris bagi kami tidak keberatan.

Kata Kunci: *Sistem Pewarisan, Pelaksanaan Pewarisan, dan Problematika Pewarisan*

ABSTRACT

Customary law is one of the important legal source in the development of national laws that moving towards legislation. Elements of psychiatric customary law that core personality of the Indonesian people need to put in new regulations that the new law was in accordance with the basic law of justice and feeling of the people of Indonesia. Customary inheritance law is to distinguish the legal terms of inheritance western, Islamic inheritance law, inheritance law Indonesia, national inheritance law, inheritance law Batak, Minangkabau inheritance law, inheritance law Java and so on. Thus the term customary inheritance law will also be called customary law of inheritance for we did not mind.

Key Words: *Inheritance systems, Implementation Inheritance and Inheritance Problems*

1. LATAR BELAKANG

Bagi suatu bangsa yang sedang membangun seperti halnya Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik daripada yang telah dicapai sebelumnya. Menghadapi kenyataan seperti itu, peranan hukum menjadi semakin penting dalam rangka mewujudkan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju kearah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan hukum masyarakat Indonesia.

Unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh nusantara ini yang dapat dijadikan titik temu dan kesamaannya dengan kesadaran hukum nasional sehingga apa yang dicita-citakan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara bahwa untuk seluruh wilayah Republik Indoinesia hanya ada satu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berasas kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana sistem pewarisan menurut hukum adat Aceh yang khususnya berlaku di Kecamatan Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan? (2) Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris? (3) Problematika apa yang dalam pelaksanaan pewarisan berdasarkan hukum waris adat di Kecamatan Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan?

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: (1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum waris adat pada daerah Provinsi Aceh khusus nya kecamatan Labuhanhaji. (2) Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan, manfaat penelitian, antara lain: (a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya, dan pada khususnya mengenai perwujudan nilai-nilai hukum waris adat. (b) Memberikan bahan masukan bahan sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini. (c) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis untuk menelaah perwujudan hukum waris adat. (d) Untuk menyelesaikan penulisan

hukum sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. Metode Pendekatan, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (empiris).¹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Aceh Yang Khususnya Berlaku di Kecamatan Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan

Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Bapak Muhamad Umar atau dengan dikenal di kampung Bapak Majelis Adat Aceh yang di kecamatan Labuhanhaji, diperoleh data diantara lain. Di kecamatan Labuhanhaji ada dua sistem menurut hukum adat, yaitu:²(a) Adat Aceh adalah adat menurut syariat Islam, bahwa warisan itu sesuai dengan Al Qur'an dan Al Hadist. Yang diumpamakan dengan pohon atau tumbuhan yang mempunyai biji, biji itulah yang tumbuh untuk menjadi cikal bakal nya.(b)Adat *Aneuk Jamee* adalah anak itu lahir/tumbuh berkembang melalui umbi pada rumpunnya. Seperti rumpun pisang anaknya tumbuh melalui umbi dalam basa aneuk jamee atau minang lebih dikenal dengan *Bako*.

Hukum di Aceh ada tiga macam, yaitu: (1) Hukum Syar'i (Syariat Islam), (2) Hukum Mahkamah/Kepemerintahan, dan (3) Hukum Adat. Dalam hal ini akan dijelaskan, penulis mewawancari salah satu pemuka agama yang dikenal dengan Abuya Syech Abu Amran Wali Al Khalidi, yang ada di kecamatan di Labuhanhaji

¹Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hal. 72.

²Muhammad Umar, Ketua Majelis Adat Aceh Kecamatan Labuhanhaji, di Kanotr MAA Kecamatan Labuhanhaji, *Wawancara Pribadi*, Labuhanhaji, tanggal 28 Juni 2016, Jam 12:00 WIB

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pewarisan secara hukum syar'i. Apabila seseorang pewaris tidak mempunyai keturunan untuk mewarisi harta warisan³, maka warisannya akan diberikan kepada seorang istri dengan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, bapak-ibunya dengan $\frac{1}{6}$ bagian, dan saudaranya akan mendapatkan bagian sisanya saja. Apabila tidak ada sisa, maka saudara-saudaranya tidak ada mendapatkan bagiannya. Namun, berbeda pula dengan apabila si pewaris yang mempunyai keturunan. Maka ia akan memberikan istri dengan $\frac{1}{8}$ bagian, $\frac{1}{6}$ bagian untuk satu anak laki-laki dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk satu anak perempuan nya dari anak pewaris, dan dan untuk saudara sekandung pewaris tidak mendapatkan bagiannya. Hal ini disebabkan mempunyai anak dari pewaris.

Jadi dalam hal kewarisan, kedudukan seorang janda menurut hukum syar'i adalah bilamana si janda mempunyai anak, akan mendapatkan bagiannya $\frac{1}{8}$ bagian, dan apabila si janda tidak mempunyai keturunan akan mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{4}$ bagian. Dan kedudukan anak laki-laki disini adalah mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ bagian dan ditambah lagi dengan sisa dari hal pewaris lagi. Jadi dengan perbandingan dengan anak perempuannya, Anak laki-laki mendapatkan bagiannya 2:1 bagian.

Dalam buku "Keadilan Pembagian Hukum Waris Islam" Muhammad Amin Sanusa menjelaskan bahwa, dalam hukum Islam ini tidak ada yang merugikan pihak orang lain dalam pembagian warisannya. Dengan demikian, dalam ini juga,

³Abuya Syech Abu Amran Wali Alkhalidi, Pimpinan Pondok Pesantren Al Darul Tsaniah Kecamatan Labuhanhaji, di Pondok Pesantren Al Darul Tsaniah, *Wawancara Pribadi*, Labuhanhaji, tanggal 5 September 2016, Jam 15:30 WIB

terdapat untuk melakukan pembagian yang secara adil dan untuk bisa mendapatkan bagian-bagiannya masing-masing juga.⁴

Adapun pembagian dalam hukum syar'i ia menjelaskan apabila seorang suami meninggal dunia, maka seorang istri akan menjadi janda dan mendapatkan bagiannya 1/8 bagian bila ada anak atau mempunyai keturunan dengan si pewaris dan atau 1/4 bagian bilamana si istri tidak mempunyai anak atau keturunan dengan si pewaris. Namun untuk orang tua si pewaris baik bapak maupun ibu nya mendapatkan 1/6 bagian dari harta waris pewaris, dan apabila saudara kandung pewaris baik itu saudara laki-laki maupun perempuannya mendapatkan sisa bila si pewaris tidak mempunyai anak. Bila mana pewaris mempunyai anak, maka, saudara sekandung nya pewaris tidak mendapatkan bagiannya.

Adapun menurut hukum adat setempat, penulis mewawancari tokoh adat di kecamatan Labuhanhaji. Beliau dikenal dengan Nek Angku Emtas, yaitu adalah sebagai berikut.⁵ Dalam pewarisan adat *aneuk jamee* harta pusaka tinggi diwariskan dari Nenek kepada Ibu, dari Ibu kepada anak perempuan. Dalam pusaka harta tinggi, hanya perempuan yang mendapatkan hak waris tersebut. Maka, apabila tidak ada keturunan anak perempuan dalam suatu keluarga tersebut atau disebut punah, maka akan harta pusaka tinggi tersebut akan dikembalikan kepada mamak atau paman kaumnya. Dalam pewarisan harta pusaka tinggi, anak laki-laki tidak mendapatkan atau tidak menerima untuk menjadi hak milik, akan tetapi diperbolehkan untuk menjadi hak pakai, selama mendapatkan izin dari mamak

⁴Muhammad Amin Sanusa, 2005, *Keadilan Pembagian Hukum Waris Islam*, Jakart ; Raja Grafindo Persada, hal 32

⁵Nek Angku Emtas, Tokoh Adat Kecamatan Labuhanhaji, di Sekretariat Gampong Pasar Lama, *Wawancara Pribadi*, Labuhanhaji, tanggal 10 September 2016, Jam 20:00 WIB

atau paman kaumnya, atau juga bisa atas dasar izin seorang Ibu atau anak perempuan dari suatu keluarga tersebut.

Sementara itu, harta pusaka rendah (harta pencaharian orang tua), apabila anak perempuan atau anak laki-lakinya meninggal maka hak warisnya dijatuhkan kepada saudara perempuan atau laki-laki lainnya. Dengan demikian, dalam pewarisan harta pusaka rendah ini hak anak laki-laki maupun perempuan itu sama saja.⁶ Atau bisa juga, apabila terdapat hanya anak tunggal tersebut meninggal maka akan menjadi harta pusaka tinggi di kaum Ibunya.

Namun, dalam hal Amir MS berpendapat dalam bukunya yang berjudul “Adat Aneuk Aceh dalam Pola dan Tujuan Hidup dalam Bermasyarakat” bahwa harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan diwariskan dari mamak atau paman kepada kemenakan atau keponakan, akan tetapi dari nenek kepada Ibu, dan dari Ibu kepada anak perempuan.⁷ Dalam harta pusaka rendah (harta pencaharian orang tua) diperoleh melalui pencaharian Bapak dan Ibunya. Harta pusaka rendah akan menjadi harta pusaka tinggi apabila dalam suatu keluarga ini tidak ada keturunan lagi untuk menjadi ahli waris, maka harta pusaka rendah tersebut akan menjadi harta pusaka tinggi bagi kaum Ibunya.⁸

Kedudukan seorang janda dalam pewarisan harta adat *aneuk jamee* seorang perempuan *aneuk jamee* apabila telah menikah, maka secara otomatis mendapatkan pembagian harta, yaitu harta pusaka tinggi dari kaumnya, dan apabila telah menjadi janda, baik janda cerai hidup maupun janda cerai mati,

⁶*Ibid*

⁷Amir MS, 2000, *Adat Aneuk Aceh dalam Pola dan Tujuan Hidup dalam Bermasyarakat*, Banda Aceh; PT Zikra Abadi, hal 93

⁸*Ibid*

maka harta pusaka tinggi tersebut, haknya masih dijaga oleh mamak kaumnya, dan harta pencaharian(pusaka rendah) selama pernikahan berlangsung, apabila cerai mati atau cerai hidup maka hak tersebut jatuh kepada janda dan anak-anak yang ditinggalkan.⁹

Apabila istri yang meninggal maka harta pusaka tinggi tersebut jatuh kepada anak perempuan dari istri tersebut, dan dikelola oleh mamak rumahnya untuk penghidupan anak-anak yang ditinggalkan ibunya. Sementara itu, harta pencaharian selama suami istri itu menikah maka harta tersebut jatuh kepada anak-anak yang ditinggalkan, dan suami tersebut tidak berhak mendapatkan harta pencaharian tersebut.¹⁰

Kekuatan hukum dan adat itu tidak boleh dipisahkan. Seumpama seperti zat dan sifatnya, karena adat itulah ada ketegasannya dalam sebuah nilai/ketentuan hukum. Ungkapan dibidang adat dan hukum:

“Lagee puteh ngen kertah (seperti putih dengan kertas), Lagee mirah ngen aneuk saga (seperti merah dengan anak saga), Lagee rasa ngen makanan (seperti rasa dengan makanan), Lagee beubewan nibak bungong (seperti harum dengan bunga), Lagee tutong ngen apui (seperti panas dengan api), Lagee dirui ngen angen (seperti sejuk dengan angin), Lagee mameh nibak saka (seperti manis dengan gula), Lagee sira nibak masen (seperti garam padanya asin), Lagee Laot meugeulombang (seperti lautan yang bergelombang), Lagee pasang cut ngen raya” (seperti pasang lautan dengan kecil dan besarnya).

Warisan menurut adat aneuk jamee adalah pusaka. Pusaka ada itu dibagi atas dua bagian, yaitu: (a) *Sako* adalah sesuatu yang diwariskan oleh kakek pada anaknya, dan ayah pada anaknya berupa yang tidak mempunyai wujud (bentuk). Contoh: Agama, Bangsawan (Gelar), Marga, dan Keturunan seperti Said, Habib, dan lain-lain. (b) *Pusako* adalah sesuatu yang diwariskan oleh kakek pada

⁹Nek Angku Emtas, Tokoh Adat Kecamatan Labuhanhaji, di Sekretariat Gampong Pasar Lama, *Wawancara pribadi*, Labuhanhaji, tanggal 10 September 2016, Jam 20:00 WIB

¹⁰Amir MS, *Ibid*, hal 95

anaknya, dan ayah pada anaknya berupa yang mempunyai wujud (bentuk). Contoh: sawah dan ladang (kebun), bangunan rumah dan toko, dan harta berharga dan surat-surat berharga.

Dalam hal ini, pusako tersebut dibagi lagi atas dua bagian, yaitu: (1) *Pusako tinggi* adalah pusaka peninggalan yang tidak boleh dimiliki maupun diperjual belikan, gunanya adalah untuk tempat kembali atau beteduh untuk anak cucu. Yang tidak mampu, apabila ia sudah berhasil (mampu) ia boleh meninggalkan tempat tersebut. (b) *Pusako rendah* adalah harta atau kekayaan yang diwariskan oleh Kakek/Nenek atau Ayah/Ibu kepada anak/cucu nya. Warisan tersebut menjadi hak milih yang menerima dan boleh diperjual belikan.

Syarat yang termasuk dalam pusako tinggi, adalah sebagai berikut: (a) Satu bidang tanah lengkap dengan bangunannya. (b) Satu bidang tanah pertanian untuk sebagai pencaharian sang anak tersebut. (c) Satu bidang tanah untuk kuburan.

Namun beranjak tahun semakin maju, maka hukum waris adat yang seperti dulu tidak dijalankan lagi sesuai dengan kaidah adat itu sendiri. Sejak zaman kerajaan di Aceh, masyarakat setempat tidak pernah mengenal dengan kata penjara (rumah tahanan). Akan tetapi, dahulu apabila masyarakat melakukan kesalahan akan diberikan berupa sanksi yaitu denda dan sanksi fisik.

Menurut Fakhurrazi, didalam bukunya yang berjudul Suku Adat Aneuk Jamee, dan Pola Tujuan Kehidupan Aneuk Jamee, *Sako*:¹¹

Sako adalah warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar pusaka, dalam kata arti segala kekayaan asal yang tidak berwujud, atau harta tua yang tidak berwujud yang berupa hak atau kekayaan tanpa ada wujudnya. Seperti contohnya

¹¹Fakhurrazi, 1998, *Mengenal Pola Kehidupan Suku Aneuk Jamee Di Aceh*, Jakarta; PT Mutiara Sumber Widya, hal 24

dalam gelar yang di dapatkan pada suku aneuk jamee, adalah sebagai berikut :
(a) Gelar penghulu; (b) Garis Keketurunan ibu atau disebut dengan sako induak;
(c) Pepatah petitih dan hukum adat; (d) Tata krama atau adat sopan santun;
(e) Marga; (f) Bangsawan; dan (g) Keagamaan, seperti Said dan Habib.

Dalam hal ini juga, *sako* yang sebagai kekayaan tanpa berwujud dapatkan diwariskan secara turun temurun menurut jalur garis keturunannya, sebagai berikut:

(1) *Garis Penghulu* diwariskan secara turun temurun kepada kemenakan yang laki-laki. (2) *Garis keturunan* diwariskan secara turun temurun kepada anak perempuan. (3) *Pepatah petitih dan hukum adat* diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu mukim, dan kepada seluruh ranah aneuk jamee. (4) *Tata krama atau adat sopan* diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu mukim, dan kepada seluruh ranah aneuk jamee. (5) *Marga, bangsawan, dan Keagamaan* itu diwariskan dari sang kakek kepada cucunya dengan melalui sistem keturunan sebelah sang Ibu.

Pusako atau yang dikenal pada suku aneuk jamee *harato pusako* adalah segala kekayaan materi atau harta benda yang dijadikan untuk cikal bakal anak atau keturunannya untuk mempunyai *pusako harato*. Yang termasuk dalam *harato pusako* tersebut adalah sebagai berikut: (a) *Hutan tanah*; (b) *Sawah ladang*; (c) *Kebun*; (d) *Rumah dan pekarang*; (d) *Pandam perkuburan*; (e) *Perhiasan dan uang*; dan (f) *Balai dan mesjid*.

Dalam hal *pusako* ini juga merupakan jainan utama untuk kelangsungan kehidupan kemenakan yang ada di aneuk jamee. Yang terutama kehidupan yang berlatar belakang kehidupannya tinggal di desa yang agraris. Namun demikian, peranan dari *pusako* ini sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal.

Adapun menurut Amir MS, *pusako* ini dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:¹²(1) *Pusako tinggi* adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. (2) *Pusako rendah* adalah segala harta hasil pencaharian dari ayah dan ibu atau orang tua kita selama ikatan perkawinan, yang ditambahi lagi

¹²Amir MS, 2001, *Peradaban Suku Aneuk Jamee Di Aceh*, Jakarta; PT Mutiara Sumber Widya, hal 93

dengan pemberian mamak atau paman dan tungganai kepada kemenakan dari hasil pencaharian mamak dan tungganai sendiri.

Akan tetapi, proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat juga disebut dengan *pusako basalin*. Oleh karena itu juga, pusaka tinggi sesungguhnya bukan diwariskan dari mamak kepada kemenakan, tetapi dari uci (nenek) kepada Umak (Ibu) kita dan dari Umak kepada saudara perempuan kita.

Pelaksanaan Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris

Berdasarkan hasil wawancara pribadi dengan Abuya Syech Haji Abdul Hamid atau dengan dikenal di kampung Ulama terkemuka yang di kecamatan Labuhanhaji.¹³ Dalam pelaksanaannya pembagian warisan kepada ahli waris di suku adat *Aneuk Jamee* di kecamatan Labuhanhaji menggunakan sistem hukum *syar'i* (hukum Islam). Dalam pembagian warisannya dijelaskan sebagai berikut :

Apabila seorang wafat, ia meninggalkan seorang istri, seorang Ibu, seorang Ayah, 2 orang saudara laki-laki kandung, 4 orang saudara perempuan kandung, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan dengan harta warisan yang ditinggalkannya sebesar Rp 780.000.000. Siapa saja yang menjadi ahli waris nya. Bagaimana dalam pembagian dalam harta warisannya. Maka dengan ini, ahli warisnya akan di berikan kepada seorang Istri, Ayah, seorang Ibu, 1 anak perempuan, dan 2 anak laki-lakinya. Untuk dua orang saudara laki-laki dan empat orang saudara perempuan tidak mendapatkan sebagai ahli waris nya. Dikarenakan, mereka itu tertutup pembagian warisannya oleh anak laki-laki atau dengan kata lain dengan

¹³Abuya Syech Haji Abdul Hamid, Tokoh Ulama Kecamatan Labuhanhaji, di Pondok Pesantren Darul Wustha, *Wawancara Pribadi*, Labuhanhaji, tanggal 26 November 2016, Jam 20:30 WIB

bahasa arab nya adalah *Mahjub*. Dalam pembagiannya dapat dirincikan sebagai berikut ini:

Yang Berhak Menjadi Ahli Waris	Bagian Ahli Waris	Pembagian Ahli Waris	Total
Istri	1/8 Bagian	$3/24 \times \text{Rp } 780.000.000$	Rp 97.500.000
Ayah	1/6 Bagian	$4/24 \times \text{Rp } 780.000.000$	Rp 130.000.000
Ibu	1/6 Bagian	$4/24 \times \text{Rp } 780.000.000$	Rp 130.000.000
2 Anak Laki-laki	Ashobah	$4/5 \times \text{Rp } 422.500.000$	Rp 338.000.000
1 Anak Perempuan	Ashobah	$1/5 \times \text{Rp } 422.500.000$	Rp 84.500.000

*Ashobah*nya dihitung terlebih dahulu, maka inilah hasilnya. $13/24 \times \text{Rp } 780.000.000 = \text{Rp } 422.500.000$. Angka 13 ini datangnya dari hasil *Radh* dikurangi dengan *Aul* (jumlah bagian dari istri sampai dengan ayah)nya. *Radh* nya dengan angka 24 dan *Aul* nya dengan angka 11.

Untuk pembagian anak laki-laki dan perempuan, perbandingannya sebesar 2:1 bagian. Jadi untuk anak laki-lakinya ada 2 orang jumlahnya 4, dan untuk anak perempuan ada 1 orang jumlahnya 1. Jadi jumlah semuanya ada 5. Cara perhitungan bagian untuk anak perempuan dan anak laki-laki, adalah sebagai berikut ini:

$$1 \text{ anak perempuan} : 1/5 \times \text{Rp } 422.500.000 = \text{Rp } 84.500.000$$

$$2 \text{ anak laki-laki} : 4/5 \times \text{Rp } 422.500.000 = \text{Rp } 338.000.000 \text{ (2 anak laki-laki)}$$

Untuk 1 anak laki-laki mendapatkan bagian sebesar Rp 169.000.000.

Dalam hal ini Amir Syaifudin menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kewarisan Dalam Pearadaban Adat Aneuk Jamee Di Aceh” menyatakan bahwa pembagian warisan dalam suku Adat Aneuk Jamee di Aceh menggunakan sistem hukum waris islam, sehingga dapat dirincikan adalah sebagai berikut untuk

siapa saja yang menjadi ahli waris nya dan pembagiannya:¹⁴ Seorang Ayah yang mendapatkan 1/6 bagian warisannya, seorang Ibu mendapatkan 1/6 bagian dari warisannya, anak laki-laki mendapatkan sisa dari warisannya itu atau dengan kata lain dengan *Ashobah* dan begitu pula dengan anak perempuan mendapatkan 1/2 bagian dari warisannya. Akan tetapi, perbandingan untuk warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1. Untuk saudara sekandung dari si pewaris tidak mendapatkan apa-apa, dikarenakan tertutup atau disebut juga dengan Mahjub, itu disebabkan si pewaris memiliki anak.

Problematika Yang Ada Dalam Pelaksanaan Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat di Kecamatan Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan

Yang muncul dalam problematika pelaksanaan pewarisan adalah sebagai berikut:¹⁵ Peradilan adat di Aceh adalah peradilan adat yang menyidangkan perkara antara masyarakat, diantara keluarga, dan antara masyarakat dengan pemerintah.

Dengan kata lain, peradilan adat di Aceh bukanlah mencari siapa yang menang dan kalah. Melainkan mencari sebuah perdamaian, hal tersebut terungkap dalam hadith maja Aceh: "*Daripada crah leubeh get beukah*" (*daripada retak lebih baik pecah*), *Daripada sihet roh meuhabe*" (*daripada miring lebih baik tumpah*), *Pakiban crah lagee nyan beukah*" (*sebagaimana retak itulah pecahnya*), *Pakiban manoe lagee nyan basah*" (*sebagaimana mandi itulah basahnya*).

Peradilan adat itu adat sejak tingkat gampong (desa) yang memimpin adalah geuchik (kepala desa). Atau orang yang ditunjuk oleh geuchik, bilamana dalam rundingan tersebut tidak ada mendapatkan hasil, maka dinaikkan ketingkat

¹⁴Amir Syaifudin, 2001, *Hukum Kewarisan Dalam Pearadaban Adat Aneuk Jamee Di Aceh*, Jakarta; PT Rajawali Grafindo Persada, hal 32

¹⁵*Ibid*

mukim. Bila di tingkat mukim juga belum ada hasilnya, maka akan naik ketingkat Ulee balang atau disebut juga camat.

Kekhasan adat *Aneuk Jamee*, adalah sebagai berikut: (1) Ninik mamak, adalah keluarga laki-laki sebelah ibu, apabila setiap ada masalah yang mengurus permasalahan tersebut adalah ninik mamak. Sekarang karena berkembangnya zaman, waktu berubah segala laporan ke pihak yang berwajib (polisi). (2) Mukim, adalah asal kata perintah bagi umat Islam yang sudah menetapkan diwajibkan untuk melaksanakan sholat jum'at. Mukim itu difungsikan sebagai koordinator beberapa gampong (desa).

4. PENUTUP

Kesimpulan.

Pertama, sistem pewarisan yang digunakan di Kecamatan Labuhan Haji adalah adat Aceh dan adat *Aneuk Jamee*, akan tetapi dalam hukum pewarisannya masyarakat setempat lebih menggunakan dengan hukum *syar'i*. Dalam hal ini, perlu kita tekan bahwa kedudukan janda dalam adat Aceh dan adat *Aneuk Jamee* itu sangat berbeda. Dalam adat Aceh kedudukan seorang janda berhak membagikan harta warisannya sesuai *syar'i*. Akan tetapi, didalam adat *Aneuk Jamee* kedudukan janda yang berhak mengelola penuh harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Untuk Ayah dan Ibu dari pewaris tidak mendapatkan bagian warisannya. Hal ini dikarenakan, itu adalah harta pencaharian selama mereka hidup.

Kedua, di kecamatan Labuhan Haji ini, dalam pelaksanaan pembagian pewarisannya lebih menonjol memakai hukum Islam (*syar'i*) walaupun di kecamatan tersebut memakai adat *Aneuk Jamee*, dan bagiannya apabila seorang

wafat atau meninggal maka dengan ini yang menjadi ahli waris nya yaitu: Istri dengan $\frac{1}{8}$ bagian, Ayah dan Ibu dari si pewaris mendapatkan $\frac{1}{6}$ Bagian, dan untuk anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan *Ashobah* (sisa dari bagian si Istri dan Ayah Ibu si pewaris). Perbandingan antara anak laki-laki dengan anak perempuan adalah sebesar 2:1 bagiannya. Akan tetapi, untuk saudara sekandung baik itu saudara laki-laki maupun saudara perempuan dari si pewaris tidak mendapatkan apa-apa. Hal ini dikarenakan, tertutup dengan adanya hisab nya anak laki-laki dari si pewaris, atau dengan kata lain *Mahjub*.

Ketiga, bila mana dalam hal ini, ada problematika akan dibawa kepada peradilan adat. Namun, peradilan adatnya ini menganut sistem kelembagaan *ninik mamak*.

Saran

Pertama, hukum waris adat di kecamatan Labuhanhaji sampai saat ini masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat setempat maka oleh karena itu kepada pemerintah dianjurkan agar dapat membantu pemerintah daerah untuk melestarikannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kedua, penguasa adat dalam menyelesaikan dan memutuskan perselisihan mengenai pembagian harta warisan tidak dilakukan secara tertulis. Oleh karena itu penulis menyarankan, demi untuk menjaga jangan terjadi salah paham di kemudian hari bagi pihak yang bersangkutan hendaknya putusan. Penguasa Adat ditetapkan dalam bentuk tertulis atau dengan lebih baik lagi bila dapat dikumpulkan dan dibukukan walaupun dalam bentuk yang sederhana sehingga dapat menjadi pedoman pada pihak lainnya yang mengalami perkara serupa.

Persantunan

Skripsi ini penulis persembahkan kepada : *Pertama*, kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang nya sampai pada saat ini. *Kedua*, abang penulis dan adek-adek penulis yang selalu memberikan suka duka nya keceriaan selama ini. *Ketiga*, Nisaul Mutoharoh selalu menemani penulis disaat suka maupun duka yang memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Amin Sanusa, Muhammad, 2005, *Keadilan Pembagian Hukum Waris Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Fakhurrazi, 1998, *Mengenal Pola Kehidupan Suku Aneuk Jamee Di Aceh*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya

MS, Amir, 2000, *Adat Aneuk Jamee Dalam Pola dan Tujuan Hidup dalam Bermasyarakat*, Banda Aceh: PT Zikra Abadi

Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Syaifudin, Amir, 2001, *Hukum Kewarisan Dalam Pearadaban Adat Aneuk Jamee Di Aceh*, Jakarta ; PT Rajawali Grafindo Persada

Umar, Muhammad, 2009, *Mengenal Suku dan Adat Aneuk Jamee di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Busafat